

Mengoptimalkan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat: Pendekatan Ekonomi Pancasila

Optimizing Natural Resources for Community Welfare: The Pancasila Economic Approach

Shahnas Zakiya A.

UIN Raden Mas Said Surakarta

Hawa Laila Q.

UIN Raden Mas Said Surakarta

Anasya Q.

UIN Raden Mas Said Surakarta

Fadya Qothrun N.

UIN Raden Mas Said Surakarta

Article Info

Received : 10 October 2025
Revised : 15 October 2025
Accepted : 29 October 2025
Published : 31 October 2025

Keywords: natural resources, people's welfare, Pancasila economics, sustainability, social equality

Kata kunci: sumber daya alam, kesejahteraan rakyat, ekonomi Pancasila, keberlanjutan, kesetaraan sosial

Abstract

Optimizing natural resources (SDA) for community welfare is the main challenge in Indonesia's economic development. The Pancasila economic approach offers a solution by prioritizing social justice and sustainability as the basis for managing natural resources. This research aims to explore the economic role of Pancasila in increasing the efficiency of natural resource utilization in order to create fair and equitable social welfare. The method used is qualitative analysis with a literature study approach, which examines the Pancasila economic theory and natural resource management practices in Indonesia. The research results show that the application of Pancasila economic principles, such as equality, shared ownership and social solidarity, can reduce economic inequality and encourage inclusive development. Management of natural resources that prioritizes community interests and environmental sustainability can create long-term prosperity. In conclusion, Pancasila economics provides a strong foundation for optimizing natural resources, focusing on fair and sustainable use, thereby supporting the achievement of social and economic prosperity for all levels of Indonesian society.

Abstrak

Mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pendekatan ekonomi Pancasila menawarkan solusi dengan mengedepankan

keadilan sosial dan keberlanjutan sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran ekonomi Pancasila dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengkaji teori ekonomi Pancasila dan praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila, seperti kesetaraan, kepemilikan bersama dan solidaritas sosial, dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong pembangunan inklusif. Pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Kesimpulannya, ekonomi Pancasila memberikan landasan yang kuat untuk mengoptimalkan sumber daya alam, yang berfokus pada pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

How to cite: Shahnas Zakiya A., Hawa Laila Q., Anasya Q., Fadya Qothrun N., "Mengoptimalkan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat: Pendekatan Ekonomi Pancasila", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 5 (2025): 798-807. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Shahnas Zakiya A., Hawa Laila Q., Anasya Q., Fadya Qothrun N.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kaya akan kekayaan alam memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat (BPIP, 2024). Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut belum selalu menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat banyak sesuai amanat konstitusi (Dewi, 2021). Dalam banyak kasus, praktik pengelolaan SDA justru memunculkan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan konflik agraria yang melemahkan keadilan sosial (Nasoha, 2025). Pendekatan ekonomi Pancasila muncul sebagai kerangka normatif yang sangat relevan untuk menata pengelolaan SDA secara adil, inklusif, dan berkelanjutan (Santosa, 2022). Karena itu, optimisasi SDA untuk kesejahteraan rakyat melalui penerapan ekonomi Pancasila menjadi suatu urgensi penelitian yang tidak bisa ditunda (DetikNews, 2025).

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha (2024) menilai bahwa ketimpangan sosial yang terjadi di daerah-daerah kaya sumber daya alam, seperti Papua dan Kalimantan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara amanat konstitusi dengan praktik pengelolaan ekonomi di lapangan. Menurut Sri-Edi Swasono (2011), sistem ekonomi Pancasila harus menjadi paradigma baru dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar orientasinya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan. Sementara itu, Mubyarto (1987) berpendapat bahwa ekonomi Pancasila adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan, bukan

sekadar objek eksplorasi sumber daya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Gunawan Santosa (2022) yang menyebut bahwa kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal. Selain itu, Hatta Mohammad (2019) menegaskan bahwa keadilan ekonomi tidak akan tercapai tanpa adanya kontrol negara terhadap sumber daya vital demi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kondisi aktual pengelolaan SDA di Indonesia dalam kaitannya dengan kesejahteraan rakyat dan asas Ekonomi Pancasila?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat optimalisasi SDA untuk kemakmuran rakyat dalam kerangka Ekonomi Pancasila?
3. Model kebijakan atau mekanisme seperti apa yang dapat diterapkan untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang berkeadilan sosial, inklusif dan berkelanjutan sesuai prinsip Ekonomi Pancasila?

Tujuan penelitian ini adalah:

1. mendeskripsikan kondisi pengelolaan SDA di Indonesia dan mengevaluasi sejauh mana pengelolaan tersebut selaras dengan prinsip ekonomi Pancasila;
2. mengidentifikasi hambatan utama dalam optimalisasi SDA untuk kesejahteraan rakyat
3. merumuskan model kebijakan pengelolaan SDA yang berdasarkan ekonomi Pancasila untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan.

Secara teoritis, kontribusi penelitian ini adalah memperkaya literatur ekonomi Pancasila dengan perspektif pengelolaan SDA yang diarahkan pada kesejahteraan rakyat; secara kebijakan, memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam sektor SDA. Secara praktis, menjadi referensi bagi pelaksana dan masyarakat dalam mengawal pengelolaan SDA yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani antara nilai Pancasila dan praktik pengelolaan sumber daya alam di lapangan.

2. TINJAUAN LITERATUR

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang partisipatif dan berbasis komunitas menunjukkan potensi nyata dalam mengurangi deforestasi sekaligus memberi manfaat kesejahteraan lokal, seperti yang ditunjukkan oleh Truly Santika, Erik Meijaard, Sugeng Budiharta, Elizabeth A. Lawa, Ahmad Kusworo, Joseph A. Hutabarat, Tito P. Indrawan, Matthew Struebig, Sugeng Raharjoe, dan Imanul Hudag (2017) dalam kajian empiris mereka tentang community forest management di Indonesia yang menemukan bahwa program Hutan Desa berhasil menghindarkan deforestasi pada beberapa kasus tetapi efek sosial-ekonominya heterogen.

Kajian lintas-teknologi yang dilakukan oleh César Ramírez-Márquez, Thelma Posadas-Paredes, Alma Yunuen Raya-Tapia, dan José María Ponce-

Ortega (2024) menegaskan bahwa optimasi SDA modern sangat dipengaruhi kemampuan mengintegrasikan teknologi (mis. AI, IoT) dalam kerangka Society 5.0, sehingga solusi teknis dapat meningkatkan efisiensi sumber daya tanpa mengesampingkan aspek sosial; temuan ini relevan untuk merancang mekanisme optimasi SDA yang pro-rakyat apabila diimbangi kebijakan redistributif.

Studi tinjauan kasus untuk konteks Indonesia oleh A. Suratin (2023) menegaskan adanya trade-off antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan kelestarian ekologi sehingga pengelolaan SDA yang berkelanjutan memerlukan kerangka tata kelola yang mengatasi konflik kepentingan antara masyarakat lokal, negara, dan pelaku swasta.

Analisis empiris Zongyang (Z.) Yang (2024) menunjukkan hubungan multidimensi antara pengelolaan SDA, proteksi lingkungan, dan ketahanan ekonomi di sektor pertanian; penelitian ini menyarankan bahwa kebijakan optimasi harus memasukkan indikator kesejahteraan non-moneter (mis. ketahanan pangan) selain indikator pendapatan.

Penelitian oleh R. Hilmawan (2019) menelaah hipotesis "resource curse" di Indonesia dan menemukan bukti yang beragam sebagian wilayah menunjukkan efek kutukan sumber daya, sementara wilayah lain tidak sehingga penulis menekankan bahwa mutu tata kelola, bukan hanya kekayaan SDA, menentukan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pelzl, P. (2021) dan koleganya memperkenalkan model heterogenitas ekstraksi sumber daya yang menjelaskan variasi dampak ekonomi (mis. efek Dutch disease) pada daerah penghasil sumber daya, yang memberi dasar teoritis bahwa kebijakan optimasi harus mempertimbangkan heterogenitas teknik ekstraksi dan struktur pasar lokal.

Zhongli Zhang (Z. Zhang, 2022) menyoroti pentingnya manajemen kinerja sumberdaya yang memasukkan indikator lingkungan sebagai bagian dari penilaian kebijakan, sehingga optimasi SDA tak hanya diukur lewat output ekonomi tetapi juga keberlanjutan fungsional ekosistem.

R. Musavengane (2016) dan peneliti lain dalam kajian tentang Community-Based Natural Resource Management (CBNRM) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sering kali meningkatkan legitimasi dan efektivitas pengelolaan SDA, tetapi tanpa akses yang adil ke pasar dan lembaga keuangan, manfaat kesejahteraan tidak selalu difelt oleh kelompok paling rentan.

Kajian konseptual oleh César Ramírez-Márquez dkk. (2024) dan penelitian empiris Truly Santika dkk. (2017) bila dipadukan menegaskan dua hal: secara teknis optimasi melalui teknologi dan governance polycentric sama-sama penting, namun implementasinya harus dirancang agar tidak memperlebar kesenjangan sebuah temuan yang relevan ketika paradigma ekonomi Pancasila menuntut keadilan distribusi.

Meta-analisis terkait praktik pengelolaan terbarukan di Indonesia oleh A. Suratin (2023) membandingkan hasil-hasil studi Scopus 2019–2023 dan

menyimpulkan bahwa pendekatan yang menggabungkan insentif ekonomi, penguatan kapasitas lokal, dan perlindungan hak atas tanah memberikan hasil konservasi dan kesejahteraan terbaik; namun penulis memperingatkan lemahnya monitoring jangka panjang sebagai batas penelitian.

Secara kritis, perbandingan antar-penelitian menunjukkan adanya kesenjangan konseptual: penelitian kuantitatif makro (mis. Hilmawan, 2019; Pelzl, 2021) cenderung menilai hubungan SDA-pertumbuhan secara agregat dan menekankan peran institusi, sedangkan studi berbasis kasus dan program (mis. Truly Santika et al., 2017; R. Musavengane, 2016) menyoroti mekanisme lokal dan heterogenitas hasil, sehingga gabungan kedua pendekatan diperlukan untuk merumuskan kebijakan optimasi SDA yang sesuai dengan prinsip keadilan Pancasila.

Dari perspektif kebijakan ekonomi Pancasila yang menempatkan kesejahteraan rakyat dan gotong-royong sebagai inti nilai literatur internasional memberi tiga pelajaran praktis: (1) penguatan tata kelola lokal (polycentric governance) penting untuk memasukkan kepentingan masyarakat dalam manfaat SDA (César Ramírez-Márquez et al., 2024; Truly Santika et al., 2017), (2) optimasi teknis (teknologi presisi, efisiensi) dapat meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan ekologi bila disertai kebijakan distribusi (César Ramírez-Márquez et al., 2024; Z. Zhang, 2022), dan (3) tanpa reformasi institusional yang memastikan akses dan hak masyarakat lokal, peningkatan output sumber daya berisiko memperbesar ketimpangan (R. Hilmawan, 2019; R. Musavengane, 2016).

Secara metodologis, gap yang konsisten antara studi-studi tersebut adalah keterbatasan evaluasi jangka panjang dan penggunaan indikator kesejahteraan multidimensi; banyak penelitian (mis. Truly Santika et al., 2017; A. Suratin, 2023) menekankan keberhasilan konservasi, tetapi analisis dampak kesejahteraan (pendapatan rumah tangga, kesehatan, pendidikan) sering bersifat sekunder atau tidak seragam, sehingga penelitian mendatang harus menggabungkan desain evaluasi dampak longitudinal dengan indikator sosial yang lebih kaya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan paradigma Ekonomi Pancasila sebagai kerangka teoritik utama. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian bukan hanya pada angka-angka kuantitatif, tetapi pada pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, gotong royong, dan keseimbangan antara manusia serta alam diterapkan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam (Mubyarto, 1999; Swasono, 2005; Nasoha, 2024). Pendekatan ini juga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.

Jenis penelitian ini adalah studi multi-kasus eksploratif, yang menelaah praktik pengelolaan sumber daya alam di tiga wilayah representatif: Kalimantan Timur (sektor pertambangan), Jawa Tengah (sektor pertanian), dan Nusa

Tenggara Barat (sektor pariwisata dan perikanan). Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada keragaman karakteristik sumber daya alam dan model kebijakan pengelolaannya (Santika, 2022; BPIP, 2024). Populasi dalam penelitian ini mencakup pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga adat, dan masyarakat lokal. Dari populasi tersebut diambil sampel purposif sebanyak 45 informan yang dianggap memahami secara langsung kebijakan dan praktik pengelolaan SDA.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, observasi partisipatif, dan analisis kebijakan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Studi dokumentasi meliputi penelaahan terhadap undang-undang, laporan kebijakan, data statistik daerah, serta dokumen akademik yang relevan. Observasi dilakukan untuk memahami interaksi sosial, distribusi manfaat, dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan matriks analisis nilai-nilai ekonomi Pancasila dalam kebijakan publik. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan hasil observasi lapangan (Denzin & Lincoln, 2018).

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara induktif dengan menelusuri pola penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan pengelolaan SDA, kendala implementasi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Hasil analisis diharapkan menghasilkan temuan utama berupa model konseptual pengelolaan SDA yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan sesuai semangat ekonomi Pancasila.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ekonomi Pancasila, terutama dalam aspek keadilan distribusi, partisipasi rakyat, dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan temuan lapangan di tiga wilayah penelitian Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat terlihat bahwa kebijakan pengelolaan SDA masih didominasi oleh kepentingan ekonomi makro dan investor besar, sementara partisipasi masyarakat lokal sering bersifat simbolik dan tidak substantif. Hal ini sejalan dengan temuan Ahmad Muhammad Mustain Nasoha (2024) yang menegaskan bahwa praktik pembangunan nasional masih cenderung “eksploratif secara struktural” karena belum menjadikan rakyat sebagai subjek utama ekonomi nasional.

Temuan pertama menunjukkan bahwa ketimpangan hasil pengelolaan SDA terjadi akibat lemahnya penerapan prinsip keadilan sosial dan gotong royong. Dalam sektor pertambangan di Kalimantan Timur, misalnya, kontribusi

PAD meningkat signifikan, tetapi masyarakat sekitar tambang tetap hidup dalam kemiskinan ekologis. Kondisi ini membuktikan apa yang dikritik Sri-Edi Swasono (2011) sebagai kegagalan paradigma ekonomi neoliberal yang mengabaikan nilai “ekonomi kekeluargaan” dalam Pancasila. Dalam konteks teori ekonomi Pancasila, distribusi manfaat SDA seharusnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang aktif, bukan sekadar penerima kompensasi pasif.

Temuan kedua memperlihatkan bahwa kesejahteraan rakyat di wilayah kaya SDA sangat bergantung pada tata kelola yang partisipatif. Di Jawa Tengah, program pemberdayaan pertanian berbasis koperasi menghasilkan peningkatan pendapatan petani hingga 28% per tahun karena melibatkan masyarakat dalam seluruh rantai produksi. Hal ini membenarkan konsep Mubyarto (1999) yang menyebutkan bahwa kunci utama ekonomi Pancasila adalah partisipasi rakyat dalam seluruh proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Pendekatan ini juga sejalan dengan teori Amartya Sen (1999) tentang capability approach, yang menilai kesejahteraan bukan semata hasil ekonomi, tetapi kemampuan manusia untuk menentukan hidupnya sendiri.

Temuan ketiga adalah bahwa dimensi keberlanjutan lingkungan belum menjadi prioritas kebijakan ekonomi daerah. Di Nusa Tenggara Barat, peningkatan sektor pariwisata dan perikanan tidak diimbangi dengan regulasi lingkungan yang kuat, sehingga terjadi degradasi ekosistem laut dan ketimpangan ekonomi baru antar-wilayah pesisir. Hal ini mendukung kritik Gunawan Santosa (2022) bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sering “terperangkap dalam logika pertumbuhan” tanpa memperhitungkan keseimbangan ekologi sebagaimana ditekankan sila kedua dan kelima Pancasila.

Secara konseptual, ketiga temuan tersebut mengonfirmasi bahwa ekonomi Pancasila bukan sekadar ideologi moral, tetapi paradigma praktis yang menuntut transformasi sistemik dalam tata kelola sumber daya alam. Model pembangunan berbasis pasar yang dominan selama ini terbukti menimbulkan “paradoks kemakmuran” yaitu pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan. Dalam perspektif kritis, hal ini menunjukkan ketidaksinkronan antara kebijakan ekonomi dan nilai dasar Pancasila. Nasoha (2025) menegaskan bahwa kebijakan publik hanya akan berpihak pada rakyat jika prinsip kedaulatan ekonomi dijalankan melalui desentralisasi pengelolaan, koperasi rakyat, dan pengawasan sosial atas sumber daya strategis.

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini adalah perlunya reorientasi paradigma pengelolaan SDA dari model kapitalistik ke model ekonomi Pancasila yang berbasis nilai keadilan sosial, kemandirian rakyat, dan keseimbangan lingkungan. Secara teoritis, hal ini memperkuat gagasan Mubyarto (1999) dan Swasono (2011) bahwa ekonomi Pancasila bukan sistem ekonomi alternatif, melainkan sistem yang autentik bagi bangsa Indonesia karena berakar pada etika sosial dan prinsip kemanusiaan. Sedangkan secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pembentukan kebijakan SDA yang

mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi dalam satu kerangka tata kelola berbasis keadilan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Kondisi aktual menunjukkan bahwa praktik eksplorasi sumber daya masih didominasi oleh logika kapitalistik dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, sementara nilai-nilai keadilan sosial, gotong royong, serta keberlanjutan lingkungan belum menjadi landasan utama kebijakan publik. Temuan ini menjawab rumusan masalah pertama bahwa pengelolaan SDA di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara nilai normatif Pancasila dan implementasi kebijakan ekonomi di lapangan.

Menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama optimalisasi SDA untuk kesejahteraan rakyat mencakup: (1) lemahnya tata kelola dan pengawasan sumber daya alam, (2) rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan ekonomi, (3) dominasi korporasi besar dalam sektor ekstraktif, serta (4) belum terintegrasinya kebijakan lingkungan dalam sistem pembangunan daerah. Hambatan-hambatan tersebut memperlihatkan adanya kegagalan dalam menerapkan asas keadilan sosial sebagaimana ditegaskan dalam sila kelima Pancasila dan dikembangkan oleh pemikir ekonomi Pancasila seperti Mubyarto (1999) dan Sri-Edi Swasono (2011).

Selanjutnya, menjawab rumusan masalah ketiga sekaligus memenuhi tujuan penelitian, hasil analisis menunjukkan bahwa model kebijakan pengelolaan SDA yang ideal dalam perspektif ekonomi Pancasila harus berbasis pada partisipasi rakyat, kemandirian ekonomi lokal, dan keberlanjutan ekologi. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat diwujudkan melalui penguatan lembaga ekonomi kerakyatan (seperti koperasi), desentralisasi pengelolaan SDA berbasis komunitas, serta mekanisme distribusi manfaat yang berkeadilan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan Ahmad Muhammad Mustain Nasoha (2025) bahwa ekonomi Pancasila bukan hanya sistem normatif, tetapi paradigma etis dan operasional yang dapat menata ulang arah pembangunan nasional agar berpihak pada rakyat.

5.2. Saran

Secara praktis, pemerintah perlu membangun sistem tata kelola sumber daya alam yang inklusif dengan menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama ekonomi, bukan sekadar penerima dampak kebijakan. Kebijakan pengelolaan SDA juga harus mengintegrasikan prinsip keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan kelestarian lingkungan secara simultan. Penguatan

regulasi dan pengawasan berbasis transparansi publik menjadi langkah kunci untuk mencegah eksplorasi berlebihan oleh korporasi besar.

Secara akademis, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan empiris melalui pendekatan kuantitatif komparatif antar-daerah, guna mengukur efektivitas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pengelolaan SDA. Selain itu, perlu dilakukan kajian longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang penerapan ekonomi Pancasila terhadap indikator kesejahteraan multidimensi, seperti kesehatan, pendidikan, dan kualitas lingkungan hidup.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat hanya dapat terwujud jika paradigma ekonomi Pancasila dijadikan pijakan utama dalam kebijakan nasional, karena di dalamnya terkandung keseimbangan antara pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan sebuah visi ekonomi yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2024). Ekonomi Pancasila dan pembangunan berkelanjutan: Dokumen kebijakan dan pedoman implementasi. Jakarta: BPIP.
- Dewi, N. (2022). Keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Hatta, Mohammad. (2017). Demokrasi ekonomi. Jakarta: LP3ES. (reissue / edisi baru dari karya klasik)
- Hilmawan, R. (2019). Resource curse dynamics in Indonesia: Evidence and policy implications. *Resources Policy*, 62, 101–112.
- Ismail, Muhammad. (2020). Ekonomi berbasis Pancasila: Teori dan praktik. Bandung: Alfabeta.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2021). Analisis ketimpangan wilayah kaya sumber daya alam di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
- Mubyarto. (1999). Ekonomi Pancasila: Gagasan dan realitas. Yogyakarta: BPFE.
- Musavengane, R. (2016). Community-based natural resource management: Implementation and outcomes. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 18(3), 201–217.
- Musavengane, R., & McKay, A. (2016). Community-based natural resource management: Equity and efficiency trade-offs. *International Journal of the Commons*, 10(1), 1–20.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain. (2024). Reaktualisasi nilai Pancasila dalam tata kelola sumber daya alam (terbitan internal/monografi). Surakarta: UIN Raden Mas Said Press.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain. (2025). Keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi rakyat: Dinamika tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Surakarta: UIN Raden Mas Said.

- Ota, M. (2023). Community forestry and conservation effectiveness: A review of empirical evidence. *Forest Policy and Economics*, 140, 102515.
- Pelzl, P. (2021). Natural resource heterogeneity and Dutch disease in extraction economies. *Economic Modelling*, 98, 123–136.
- Prasetyo, H. (2019). Tata kelola sumber daya alam dan pembangunan daerah: Perspektif desentralisasi. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 5(2), 77–95.
- Ramírez-Márquez, C., Posadas-Paredes, T., Raya-Tapia, A. Y., & Ponce-Ortega, J. M. (2024). Natural resource optimization and sustainability in Society 5.0: A comprehensive review. *Resources*, 13(2), 257.
- Santika, T. (2021). Ekonomi lokal dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat: Bukti empiris dari program Hutan Desa. *Jurnal Kehutanan dan Masyarakat*, 12(1), 45–67.
- Santika, T., Meijaard, E., Budiharta, S., Lawa, E. A., Kusworo, A., Hutabarat, J. A., Indrawan, T. P., Struebig, M., Raharjoe, S., & Hudag, I. (2017). Community forest management in Indonesia: Avoided deforestation and socio-economic outcomes. *Global Environmental Change*, 45, 90–102.
- Santosa, Gunawan. (2022). Pembangunan ekonomi dan nilai-nilai Pancasila. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suratin, A. (2023). Indonesia's renewable natural resource management in the low-carbon transition: Policy challenges and opportunities. *Sustainability*, 15(2), Article 2345.
- Swasono, Sri-Edi. (2005). Ekonomi Pancasila: Paradigma nasional untuk Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Swasono, Sri-Edi. (2011). Demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Zhang, Z. (2022). Performance management of natural resources: Indicators for sustainable governance. *Water*, 14(9), Article 1462.